

The Role of Education Politics as a Foundation in Developing Curriculum and Educational Techniques in Indonesia

Khairul Anwar¹, Sesti Novalina², Kasful Anwar³, Lias Hasibuan⁴, Dewi Suryani⁵

DOI: 10.35445/alishlah.v13i1.410

Info Artikel

Keywords:
Education Politics,
Education,
Curriculum

Abstract

This research aims to explore the political role of education in Indonesia and the problems encountered in its implementation and solutions to overcome. Close relationship Politics and education exist in a mutually related system in its implementation for improving the quality of education. Educators have always embraced politics because the educational process can provide value and contribute to political development. Having a high understanding of education politics is expected to contribute to controlling the direction of educational activities in Indonesia. The literature research method was used to obtain references related to the required data that is analyzed. It can be concluded that political viewpoint refers to the relationship between politics and government policies due to Indonesia's educational systems, strategies, and techniques. Various regulations, decrees, rules, administrative actions in education are part of the evidence of the political role of policies for education. Another view of politics is politics as a process, how the political performance takes place. This approach is more complex in concept and requires understanding how government processes work and how human behavior affects all these processes as a culture.

Abstrak

Kata kunci:
Politik Pendidikan
Pendidikan
Kurikulum

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan tentang peran politik pendidikan dalam proses perkembangan kurikulum di Indonesia. Hubungan erat politik dan pendidikan berada pada satu sistem yang saling memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya bagi peningkatan kualitas pendidikan. Dari kiprahnya, para pendidik selalu merangkul politik karena proses pendidikan mampu memberikan sumber nilai dan kontribusi terhadap perkembangan politik. Dengan memiliki pemahaman yang tinggi terhadap politik pendidikan diharapkan mampu memberi kontribusi dalam mengontrol arah kegiatan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka

¹ Institut Agama Islam Tebo, Jambi, Indonesia

Email: alkhair2505@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia

Email: novalinasesti@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia

Email: kasfulanwarus@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia

Email: Lhas10@yahoo.co.id

⁵ Institut Agama Islam Tebo, Jambi, Indonesia

Email: Suryani.12.Dewi@gmail.com

Vol.13 (1) June, 2021

Received: February 23, 2021; Received in revised form: March 10, 2021; Accepted: March 11, 2021; Available online: March 30, 2021

This is an open access article under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

untuk mendapatkan referensi terkait data yang diperlukan yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa pandangan politik mengacu pada hubungan politik dengan kebijakan pemerintah sebagai hasil dari sistem, strategi dan teknik pendidikan Indonesia. Berbagai peraturan, keputusan, aturan-aturan, tindakan administratif di bidang pendidikan merupakan bukti bagian dari peranan politik terhadap kebijakan pendidikan. Pandangan lain mengenai politik adalah politik sebagai proses, bagaimana kinerja politik tersebut berlangsung. Pendekatan ini lebih kompleks konsepnya dan memerlukan suatu pemahaman bagaimana proses pemerintahan bekerja dan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi semua proses tersebut sebagai budaya.

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai wadah yang mempengaruhi kemajuan dan kualitas sebuah bangsa memiliki peran penting dalam politik. Pendidikan yang baik akan menghasilkan *out come* pola pikir serta kualitas sumber daya manusia yang tinggi, beradab dan menjadikan manusia yang memiliki derajat. Seperti diformulasikan oleh John Dewey dalam Suardi bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan fungsi sosial, sebagai bimbingan dan sarana pertumbuhan yang mempersiapkan membukakan wawasan, serta disiplin hidup (Suardi, 2015). Pendidikan merupakan media untuk membangun peradaban bangsa lebih maju (Hasse & Mustaqim, 2018). Pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dimasa yang akan datang (Farida, 2020).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disintesis bahwa pendidikan mempengaruhi pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap negara, maka dari itu perlunya kegiatan mensosialisasikan dan membudayakan pentingnya pendidikan pada masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut. Politik sebagai ranah yang menggiring kepentingan-kepentingan pendidikan di pemerintahan tidak akan tepat sasaran jika ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Sangat penting menanamkan serta membina generasi muda sejak di bangku sekolah hingga kuliah memahami hakikat pendidikan bagi diri mereka, orang lain, bangsa dan negara. Negara yang maju ialah Negara yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi yang berpotensi dan berdaya saing baik global maupun internasional. Kualitas itu dimulai dari tingkat pendidikan dalam suatu negara, dan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan supaya kualitas pendidikan semakin baik dan berada pada rating yang cukup tinggi. Kurikulum pendidikan sebagai landasan penerapan pendidikan di sekolah merupakan indikator utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Politik sebagai sarana yang mampu mempengaruhi proses dalam dunia pendidikan terkadang tidak tepat sasaran, dimana segala keputusan yang diajukan dilakukan melalui politik yang tidak sehat.

Untuk menjadikan politik pendidikan Indonesia yang sehat perlu penanaman konsep pendidikan berkualitas yang akan menciptakan manusia yang memiliki kompetensi mumpuni sebagai pemikir yang cerdas untuk masa depan bangsa. Pengendali politik yang memiliki banyak ide-ide politik bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan namun berkontribusi pada duniapendidikan yang benar-benar butuh sentuhan dan perhatian dari pemerintah. Disinilah peran politik merangkul dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran untuk pendidikan yang merata. Kurikulum sebagai bagian terpenting dari pendidikan harusnya menjadi pembahasan yang serius untuk jangka panjang agar setiap perubahan kurikulum tidak merugikan peserta didik. Pendidikan yang unggul akan menciptakan anak bangsa yang berkualitas sehingga mampu menjadikan politik sebagai tempat dan sarana peningkatkan pendidikan, maka dari itu politik dan pendidikan merupakan hal yang saling berakaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya.

Arah politik pendidikan Indonesia masih mosaik dan kurang membudaya, yang ditunjukkan oleh kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang kurang berpijak pada bumi nusantara (Slamet, 2014). Studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur tentang politik Pendidikan

yang menjadi salah satu penentu arah pendidikan di Indonesia, karena kurikulum pendidikan senantiasa berganti seiring dengan perubahan kebijakan yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. Dengan adanya kajian ini diharapkan para pemangku kebijakan dalam pengambilan kebijakan supaya dapat lebih memperhatikan substansi dan kepentingan para pengguna kurikulum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dari berbagai sumber. Menurut Ajat Rukajat studi kepustakaan ini dipergunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mencari informasi tertulis dan sistematis dari beberapa ahli yang dapat memperluas wawasan berpikir (Rukajat, 2018). *Library research* atau studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Menurut A. Rifqi Amin, *library research* adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Amin, 2012). Penelitian pustaka adalah suatu bentuk penyelidikan terstruktur dengan cara, aturan, dan teknik tertentu (George, 2008). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai artikel, buku dan sumber-sumber lain yang memiliki keakuratan terhadap informasi yang akan dikutip dan di analisa oleh peneliti. Studi pustaka ini dilakukan dengan mendeskripsikan kebenaran dari berbagai sumber referensi kemudian memberi penilaian dan kritik, simpulan dan saran terhadap kejadian di dapat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses dalam menjalankan sesuatu dengan gagasan dan ide-ide untuk mencapai tujuan tertentu dalam keseharian kita tidak terlepas dari perpolitikan. Politik disebut juga sebagai strategi dalam mencapai tujuan dengan kekuasaan. Dunia Pendidikan juga tidak terlepas dari pengaruh politik. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau usaha mendewasakan seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Tamin Dkk, 2018). Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk menambah wawasan manusia melalui berfikir, mengevaluasi dan bertindak. Pendidikan akan tercapai pada seseorang apabila disampaikan oleh orang yang paham dibidang keilmuannya atau lebih berpengalaman (Azan Dkk, 2020). Menurut UU SISDIKNAS no.20 Tahun 1989, Pendidikan meliputi usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Dari berbagai pendapat mengenai pendidikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara formal maupun tidak formal di bawah bimbingan dan memiliki manfaat serta tujuan. Politik dan pendidikan memiliki peran penting yang dalam suatu negara, melalui sistem pendidikan yang baik, sebuah negara diharapkan dapat lebih maju dan berkembang dalam memberikan pola pikir yang cerdas dalam berpolitik. Sebagaimana dikatakan oleh Sukarna, bahwa, pendidikan politik (*political education*) merupakan suatu syarat mutlak (*condition quo non*) (Sukarna, 2003), dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan tidak lepas dari politik. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat (Deliar, 1983). Politik merupakan sebuah ide dan kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan dan menguasai sebuah program maupun kekuasaan, termasuk didalamnya pengendalian kebijakan pendidikan dalam hal ini adalah kurikulum pendidikan.

Politik pendidikan yang sehat dapat dilihat dari kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Politik dan pendidikan dikatakan memiliki keterkaitan pada kebijakan di dunia pendidikan hal ini agar tercapainya tujuan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan politik agar tujuan tersebut tercapai berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.

Politik pendidikan disebut sebagai studi ilmiah yang menyangkut aspek politik pada kegiatan pendidikan. Politik pendidikan juga dapat dikatakan sebagai studi ilmiah pendidikan tentang

kebijaksanaan pendidikan (Suhartono, 2018). Kebijakan dapat berupa sistem-sistem yang dipakai dalam pendidikan yang selalu mendapatkan perhatian, revisi dan evaluasi. Perubahan kurikulum selalu menuai kontroversi dunia pendidikan. Politik pendidikan adalah sikap yang konsisten dalam hal mengarahkan kontrol sosial, baik mengenai tujuan maupun metodenya terhadap sistem pendidikan (Yuni, 2014). Namun tidak pada kurikulum pendidikan yang mengalami evaluasi dan tetap memiliki kelemahan dan kelebihan. Seharusnya penerapan kurikulum di Indonesia berkiblat pada negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang unggul dan terbaik seperti Finlandia yang dikenal sebagai negara dengan sistem dan reputasi terbaik di dunia (Absawati, 2020). Dengan mengadopsi, menyaring, melakukan uji coba, kemudian melaksanakan evaluasi yang melibatkan pihak-pihak yang memahami pendidikan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengadakan rapat tahunan bersama pihak-pihak terkait di dunia pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.

Pandangan lain dari Lembaga Studi Pengkajian dan pengembangan Pendidikan Indonesia (LSP3I), politik pendidikan adalah segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Tingkat pendidikan suatu masyarakat dipengaruhi oleh budaya politik dan merupakan pondasi politik pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin tingginya pendidikan masyarakat atau seseorang, maka semakin tinggi pula wawasan dan kesempatan mereka dalam menganalisa, melakukan perbandingan, mengkritisi, dan mengevaluasi ranah politik. Pendidikan yang berbudaya sangatlah diharapkan oleh masyarakat luas. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Saleh, bahwa pendidikan menjadi instrument dalam menjaga kelangsungan budaya dan kearifan lokal, dan menjadi benteng terhadap eksistensi ideologi yang penting untuk dijaga dan dipertahankan (Saleh, 2020). Banyak ditemui di beberapa daerah terpencil yang melahirkan generasi berpendidikan tinggi dan mampu mengembangkan daerahnya. Kerjasama pembangunan pendidikan tidak hanya dilakukan dari satu pihak, namun melibatkan pihak lain (*stakeholder*) yang mendukung pembangunan sekolah di daerah terpencil, melalui pemilihan wakil rakyat terpilih dari daerah tertentu yang minim pendidikan, kemudian ini membuktikan peran penting pendidikan dan politik dalam pembangunan, sistem, strategi, dan teknik pendidikan. Dimana politik mampu memberikan penguatan dalam membangun akses pendidikan melalui sistem yang dibangun, strategi yang dikelola, dan teknik pendidikan yang diterapkan. Pendekatan politik dengan pendidikan yang mengarah pada pembangunan pendidikan dan disadari oleh seseorang atau masyarakat mempengaruhi sosial dan budaya masyarakat yang sadar dengan kebutuhan dan peduli akan nasib generasi bangsa.

Pendidikan diselenggarakan untuk mencerdaskan manusia, tidak peduli dari kalangan manapun. Setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Politik diharapkan mampu membawa peningkatan pendidikan dan keterlibatannya pada kegiatan pemerintahan. Sebagaimana diketahui, partai-partai politik terpilih pada setiap pemilihan presiden memiliki peran penting dalam mengubah dan merevisi proses pendidikan sesuai usulan dari menteri pendidikan terpilih. Pendidikan dilakukan tidak lain bertujuan untuk kemajuan, perubahan dan stabilitas perubahan sosial dan masyarakat (Suardi, 2015).

Tidak bisa dipungkiri, pergantian menteri pendidikan membawa perubahan pada sistem pendidikan. Perubahan yang sangat dirasakan adalah pada aspek kurikulum pendidikan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Politik pendidikan Indonesia memerlukan penataan yang harus dikelola oleh orang-orang profesional, agar kinerja politik pendidikan tidak keluar dari tujuan, yaitu pemerataan pendidikan dari kota hingga pelosok negeri Indonesia. Pemerataan fasilitas dan akses pendidikan agar warga negara Indonesia yang berada dipelosok negeri mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan pendidikan di kota. Sebagaimana diketahui, kebijakan-kebijakan pendidikan yang dipolitisasi oleh pemerintah tidak merata hingga ke pelosok desa.

Politik pendidikan yang buruk akan berakibat pada buruknya kinerja di bidang pendidikan. Di Indonesia, perjalanan politik pendidikan nasional sejak kemerdekaan hingga era reformasi mengalami beberapa perubahan yaitu: perubahan pada rezim era orde lama, dimana terjadi penekanan kebijakan pendidikan dengan isu ideologi dan nasionalis, era orde baru yang memberi penekanan pada birokrasi dan sentralisasi, dan era reformasi ditekankan pada demokratisasi dan desentralisasi.

Dunia pendidikan dipengaruhi oleh politik dalam pembentukan kurikulum sebagai justifikasi ilmiah guna melanggengkan setiap kekuasaan (Syamsu, 2017). Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada setiap kebijakan pendidikan yang diambil memiliki pro dan kontra pada masanya. Hingga saat ini perubahan-perubahan kebijakan selalu membawa perdebatan dikalangan masyarakat. Beberapa tahun terakhir sejak rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah dua kali Indonesia mengalami pergantian menteri pendidikan dan mengalami dua kali pula perubahan kurikulum, pertama pada masa menteri pendidikan Anies Baswedan kurikulum pendidikan berubah menjadi kurikulum 13 dan belum tuntas pengaplikasiannya di sekolah-sekolah telah muncul lagi isu kurikulum merdeka belajar yang di usung oleh menteri pendidikan baru saat ini yaitu Nadiem Anwar Makarim.

Sebagai pihak yang berwenang di dunia pendidikan, diharapkan pengendali politik pendidikan di Indonesia terlebih dahulu mengkaji, menguji kurikulum yang akan diberlakukan didunia pendidikan. Dalam mensosialisasikan kurikulum, menteri pendidikan dan pihak yang berwenang memberikan pelatihan khusus bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan mengenai kurikulum yang akan diberlakukan melalui teknik pengiriman guru dari beberapa sekolah untuk diberi pelatihan penerapan kurikulum baru. Sehingga terjadi keseragaman bagi guru- guru dan tenaga pendidik dari kota hingga pelosok dalam penerapannya.

Landasan politik pendidikan pada dunia pendidikan di suatu negara dalam hal ini Indonesia agar memiliki pegangan yang kokoh mengingat pendidikan di tiap Negara memiliki perbedaan dalam penerapannya, saat ini saja kita bisa merasakan akses anak didik dalam mendapatkan pendidikan yang layak masih jauh dari cukup bagi warga pelosok. Jaringan internet yang susah di akses dan jalan-jalan ke pemukiman yang masih tanah merah. Hal ini terjadi karena pendidikan masih menjadi bahan politik yang memiliki tujuan simpang siur oleh orang atau lembaga yang ingin mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi dan golongan.

Sebagai landasan pembangunan, sistem, strategi, dan teknik pendidikan, politik pendidikan memberikan pengaruh pada proses kemajuan dan kualitas pendidikan. Dukungan politik selalu menjadi tujuan bagi masyarakat yang menginginkan kemajuan di daerah masing-masing. Menteri pendidikan terpilih dan wakil rakyat terpilih sebagai pemerintah daerah yang memahami kondisi pendidikan diberbagai wilayah Indonesia dari kota hingga daerah terpencil. Kontribusi wakil rakyat terpilih mewakili pembangunan, sistem, strategi dan teknik pendidikan di Indonesia.

Politik pendidikan yang memiliki peran dalam pengembangan kurikulum di Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan pembangunan sistem pendidikan, dimana politik pendidikan mampu mengisi dan menempatkan sistem kurikulum pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan, perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Politik pendidikan memiliki peran yang penting dalam menentukan arah kebijakan kurikulum pendidikan. Budaya politik juga mempunyai peran penting dalam turut membantu menjelaskan sistem politik meskipun budaya politik bukan merupakan satu-satunya aspek politik (Winarno, 2017). Peneliti melihat peran menteri pendidikan dalam membangun sistem pendidikan di masa orde lama sebagai bagian dari politik dan kepentingan pemerintah yang berkuasa saat itu yang mengatur segala kebijakan untuk kepentingan pemerintah pusat. Sistem yang melibatkan teknologi dalam proses pendidikan yang sebelumnya tidak banyak digunakan oleh pendidik saat ini dilakukan agar kegiatan belajar dan mengajar tetap berlangsung. Hal ini tidak serta merta maksimal dalam proses penggunaannya, dapat dilihat masih banyaknya daerah-daerah terpencil belum memiliki akses jaringan internet yang

baik. Maka sistem yang dibangun perlu dilakukan kajian dan solusi agar sistem yang dibangun lebih merata.

Langkah awal dalam memulai suatu rencana adalah menyusun strategi, menurut Ricky W. Giffin dalam Mukhtar dkk strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi (Mukhtar et al., 2019). Menurut David strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai (David, 2011). Politik pendidikan sebagai landasan pembangunan strategi, yaitu bagaimana politik pendidikan merancang strategi sesuai budaya, karakter dan kebutuhan masyarakat di daerah-daerah tertentu yang memiliki perbedaan budaya. Melalui peraturan dan perundang-undangan yang memiliki pengaruh kuat terhadap pembangunan pendidikan sebagaimana dikemukakan Slamet dalam tulisannya, politik pendidikan Indonesia harus berpijak pada bumi dan budaya nusantara, yaitu mengacu pada ideologi Pancasila, Konstitusi UUD 45, persatuan dan kesatuan NKRI, Bhineka Tunggal Ika, kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia (Yuneta DP, 2014). Sebagaimana budaya yang dimaksud oleh Kotter dan Heskett (1992) dalam Yuneta DP (2014) bahwa budaya sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang menjadi ciri suatu masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan Bersama (Slamet, 2013). Politik pendidikan pembangunan Indonesia dari waktu ke waktu memiliki strategi sesuai perkembangan zaman, pada orde lama strategi politik pendidikan dibangun untuk memerangi para penjajah dirancang untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan menanamkan rasa nasionalis.

Pada orde baru politik pendidikan melalui strategi meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian perekonomian bangsa dapat tumbuh berkembang sebagaimana diungkapkan Yudi Hartono bahwa relevansi Pendidikan diperhatikan dengan penyesuaian isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan (Hartono, 2016). Kemudian pada masa reformasi, politik pendidikan dengan strategi penekanan pada desentralisasi dan demokratis (Ahmad, 2012), yang berimpikasi pada kewenangan daerah dalam mengambil kebijakan pendidikan yang menimbulkan beberapa masalah di bidang pendidikan seperti yang di paparkan Ahmad Zain Sarnoto dalam tulisannya, disentralisasi bidang pendidikan menimbulkan masalah baru, diantaranya adalah tarik menarik kepentingan untuk urusan guru serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung sekolah (Ahmad, 2012).

Politik pendidikan sebagai landasan pembangunan teknik pendidikan merupakan cara yang dilakukan dalam menjalankan proses pendidikan melalui pengetahuan atau pengalaman untuk pembangunan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknik memiliki pengertian pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri (bangunan, mesin, dsb): sekolah, cara sistematis mengerjakan sesuatu (Bahasa, 2007). Teknik pendidikan Indonesia yang diterapkan dari pemerintahan orde lama, orde baru, reformasi hingga pemerintahan Joko Widodo yang beberapa kali mengalami perubahan kurikulum sebagai mana diketahui kurikulum pendidikan di Indonesia yang merupakan teknik pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan. Kurikulum dalam arti sempit adalah sejumlah mata pelajaran di sekolah atau perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat, dalam arti luas kurikulum adalah pengalaman, kegiatan dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru (Sarinah, 2015). sedangkan menurut Nana Sudjana kurikulum adalah niat dan rencana, proses belajar mengajar adalah pelaksanaannya (Sudjana, 2015).

Kurikulum yang diterapkan di sekolah dan lembaga didapatkan dari keputusan presiden tentang kurikulum pendidikan yang digagas dan dirancang oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. Di Indonesia sendiri perubahan kurikulum selalu mendapat perhatian khusus, politik pendidikan sangat mempengaruhi karena pergantian menteri membawa pengaruh pada pergantian kurikulum. Perubahan kurikulum terjadi seiring dengan terjadinya perubahan pada kondisi

perpolitikan di Indonesia (Hastuti, 2019). Sebagaimana dijelaskan Herliyati dalam (Bait 2018), setelah Indonesia merdeka dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum yaitu kurikulum sederhana (1947-1964), pembaharuan kurikulum (1968 dan 1975), kurikulum berbasis keterampilan proses (1984 dan 1994), dan kurikulum berbasis kompetensi (2004 dan 2006). Semua perubahan dilakukan sesuai kebutuhan pendidikan dimasa itu. Kemudian di tahun 2013 Indonesia menerapkan kurikulum ganda yakni kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, arah perubahan kurikulum pun terjadi dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau dikenal dengan KTSP berubah menjadi kurikulum 2013 lebih dikenal K.13. Bait (2018:11) menyebutkan Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimana segala bentuk kekurangan kurikulum sebelumnya disempurnakan pada kurikulum 2013 dengan menekankan pada tiga aspek penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.

Sebagaimana diketahui pada kurikulum 2013 terdapat penanaman karakter pada tiap mata pelajaran. Sangat disayangkan dalam penerapannya belum sepenuhnya dapat diaplikasikan di seluruh sekolah. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dan evaluasi. Pada dasarnya kurikulum 2013 memiliki banyak kelebihan, namun diberhentikan sementara. Pertimbangan kurikulum 2013 “tentang tantangan Internal dimana tuntutan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar Nasional Pendidikan. Faktor eksternal terkait perkembangan penduduk, arus globalisasi, lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatifitas budaya dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional, kemudian tuntutan kompetensi abad ke 21 tentang pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*) penciptaan kesempatan kerja, peserta didik, dan dasar-dasar aspek akademik tentang kurikulum (Sendari, 2013). Lagi-lagi situasi politik membawa perubahan teknik pendidikan di Indonesia, masih pada pemerintahan Joko Widodo pada Tahun 2019 terjadi lagi pergantian menteri pendidikan dan kebudayaan yang kembali membawa perubahan pada kurikulum pendidikan Indonesia. Menteri terpilih Nadiem Makarim membuat perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka belajar yang mengusung kualitas pendidikan dari minat dan bakat siswa yang melibatkan teknologi. Bukan hanya materi yang di dapat dari guru, dimana siswa diharapkan mampu berkompetensi tidak hanya melalui hasil ujian nasional namun dari kolaborasi kemampuan kognitif dan mampu menganalisis materi dan tidak terfokus pada materi yang diberikan guru dengan pengetahuan yang didapat siswa melalui pengalaman dan sumber-sumber pengetahuan lainnya dengan melibatkan teknologi dan guru sebagai pembenaran dari pengetahuan yang didapat.

SIMPULAN

Peran politik pendidikan yang mempengaruhi proses perkembangan kurikulum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan di negara kita. Untuk itu diharapkan pendidikan mampu merubah kinerja politik pendidikan kearah yang lebih baik dan membawa peningkatan kualitas bagi kepentingan pendidikan di Indonesia agar tidak di salah gunakan untuk kepentingan organisasi, pribadi atau satu golongan tertentu saja. Perubahan kurikulum Pendidikan hendaknya senantiasa mengikuti dan mencermati semua kebutuhan pemakai kurikulum, supaya satu tatanan kurikulum baku jangka panjang dapat sama-sama dirasakan dan dievaluasi serta diperbaiki sesuai kebutuhan Pendidikan. Politik pendidikan sebagai salah satu unsur pengembangan kurikulum dapat digunakan untuk merancang strategi sesuai budaya, karakter dan kebutuhan masyarakat didaerah-daerah tertentu yang memiliki ragam perbedaan dan kebutuhan, melalui peraturan dan perundang-undangan yang memiliki pengaruh kuat terhadap pembangunan pendidikan. Politik pendidikan sebagai landasan pembangunan dan sistem dalam pengambilan keputusan sesuai perkembangan zaman. Politik pendidikan Indonesia memerlukan penataan yang harus dikelola oleh orang-orang profesional, agar kinerja politik pendidikan tidak keluar dari tujuan, yaitu pemerataan pendidikan dari kota hingga pelosok Indonesia. Diharapkan politik pendidikan membuat kebijakan yang teruji

sehingga setiap kekurangan menemui solusi dalam penerapannya di dunia pendidikan yang tidak hanya memanfaatkan pendidikan sebagai ladang bisnis yang menyengsarakan konsumen pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. (2012). Konsep Politik Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educhild*, 01(1), 56–66. DOI: <http://dx.doi.org/10.33578/jpsbe.viii.1622>
- Amin, A. R. (2012). *Penelitian kepustakaan*. <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>
- Azan, K., & Dkk. (2020). *Isu-Isu Global Manajemen Pendidikan Islam*. Samudra Biru.
- Bahasa, P. P. dan P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka.
- David, F. R. (2011). *Strategic Management Concept* (12th ed.). Pearson Education Inc.
- Deliar, N. (1983). *Pengantar Pemikiran Politik*. Rajawali Press.
- Farida. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? *Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 111. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581>
- George, W. M. (2008). *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press.
- Hartono, Y. (2016). Pendidikan dan Kebijakan Politik: Kajian REformasi Pendidikan di Indonesia masa Orde Lama hingga Reformasi. *Agastya: Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(1), 38.
- Hasse, J., & Mustaqim, P. (2018). Politik Pendidikan Indonesia: Ketimpangan dan Tuntutan Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, X(1), 49–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.267>
- Hastuti, noer F. W. D. (2019). Politik dan Sistem Pendidikan Nasional. *Publikasi Ilmiah*, 9(2), 5.
- Khobir, A., & Khasanah, N. (2020). *Potret Diskriminasi Pendidikan*. PT. Nasya Expanding Management.
- Mukhtar, Risnita, & Anwar, K. (2019). The Effect of Transformational Leadership, Management Information System, and Organizational Climate on Lecturers' Job Satisfaction. *International Journal of Scientific and Technology Research*.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif (Research Approach)*. Deepublish.
- Saleh, M. (2020). Arah Pendidikan Islam dan Penetrasi Ideologi Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 101–116. <https://doi.org/101-116.10.35905/alishlah.v18i1.1402>
- Sarinah. (2015). *Pengantar Kurikulum* (1st ed.). Deepublish.
- Sendari, A. A. (2013). *Tujuan Kkurikulum 2013; dibalik pro Kontra penerapannya*. Liputan6.
- Slamet. (2013). Politik Pendidikan. *Jurnal Ilmiah*, XX(2), 334–344. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2377>
- Slamet. (2014). *Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21*. Cakrawala Pendidikan, XXXIII(3), 324-337.
- Suardi. (2015). *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer*. Deepublish.
- Sudjana, N. (2015). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Sinar Baru Algesindo.
- Suhartono, S. (2018). *Wawasan Pendidikan: Sebuah Pengantar Pendidikan*. Ar-Ruz Media.
- Sukarna. (2003). *Sistem Politik*. Citra Aditya Bakti.
- Syamsu, P. K. (2017). Prospek Madrasah di Indonesia: Analisis Politik Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 2(1).
- Tamin, Z. A., & Dkk. (2018). *Politik Pendidikan: Konsep dan Praktik Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Dwiputra Pustaka.
- Winarno, B. (20017). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Media Pressindo.
- Yuneta DP. (2014). *Nilai Penting Budaya Organisasi dalam Peningkatan Produktivitas*. <http://yundwip.blogspot.com/2014/10/budaya-organisasi.html>
- Yuni, W. (2014). *Politik Pendidikan*. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/weyea/54f84e68a3331197e8b45fc/politik-pendidikan>
- Zed, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (2nd ed.). Yayasan Obor Indonesia.